PERBAIKAN PROSES BISNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG MENGGUNAKAN METODE *BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT* UNTUK MEMENUHI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 54 TAHUN 2010 DAN KLAUSUL 7.3 ISO 9001:2008

IMPROVING BUSINESS PROCESS TO CONSTRUCTING RENCANA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA BANDUNG REGENCY USING BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT METHOD TO FULFILL THE REQUIREMENTS OF MINISTER OF HOME AFFAIR REGULATION NUMBER 54 OF 2010 AND ISO 9001:2008 CLAUSE 7.3

[1]Indah Kusuma M Noor, [2]Yati Rohayati., [3]Atya Nur Aisha
[1]Prodi S1 Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Telkom
[1]indahkusuma.46@gmail.com [2]yatirohayati.ittelkom@gmail.com, [3]atyanuraisha@gmail.com

Abstrak - Fungsi Renja di Dispopar Kabupaten Bandung yaitu mewujudkan misi Dispopar yang dijabarkan kembali melalui tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Penyusunan Renja harus sesuai dengan aturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 54 Tahun 2010 dan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3 agar proses desain dan pengembangan dapat terjamin dengan baik dan dokumen terpelihara dengan benar. Untuk memperoleh kedua pesyaratan tersebut dilakukan analisis *gap* antara proses bisnis aktual penyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung dengan PERMENDAGRI No.54 tahun 2010 mengenai penyusunan Renja. Hasil analisis gap kemudian dibandingkan dengan persyaratan 9001:2008 klausul 7.3. Pada penelitian ini untuk memperbaiki proses bisnis agar menjadi efektif dan efisien dilakukan dengan menggunakan metode *Business Processs Improvement* (BPI). Metode BPI dilakukan mencakup analisis aktivitas yang dilanjutkan dengan penyederhanaan menggunakan 13 *tools streamlining*. Hasil analisis aktivitas terdapat 14 RVA dan 12 BVA. Selanjutnya, dilakukan analisis *streamlining* dengan menggunakan metode *Process cycle time reduction, Simplification, Duplicate elimination,* dan Pengubahan urutan proses. Setelah itu, hasil analisis diverifikasi kepada pemilik proses masing-masing aktivitas. Dari penyederhanaan tersebut akan dirancang *Standard Operating Procedure* (SOP) Penyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung serta 19 Instruksi Kerja.

Kata kunci : SOP, BPI, ISO 9001:2008 klausul 7.3, Renja

Abstract – Function of Dispopar Renja in Bandung regency, namely to realize the mission outlined Dispopar back through the strategic goals and objectives more operational. Preparation of theRenja should be in accordance with the Home of Minister Affairs (PERMENDAGRI) No. 54 of 2010 and the requirements of ISO 9001: 2008 clause 7.3 for the process design and development can be guaranteed with the well and the documents properly maintained. To obtain these requirements into account both the analysis gap between aktual business processes to arranged Renja Dispopar Bandung Regency with PERMENDAGRI Number 54 of 2010 regarding the preparation of the working plan. Gap analysis results were then compared with the requirements of 9001: 2008 clause 7.3. In this study, to improve business processes in order to be effectively and efficiently accomplished by using the Business Processs Improvement (BPI). BPI method includes an analysis of the activities carried out, followed by simplification using 13 tools streamlining. Results of the analysis contained activity RVA 14 and 12 BVA. Furthermore, the streamlining analysis using Process cycle time reduction, Simplification, Duplicate elimination, and reordering process. After that, the analysis results verified to the process owner of each activity. The simplification will be designed from the Standard Operating Procedure (SOP) Preparation Renja Dispopar Bandung District and 19 Work Instructions.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan langkah penetapan arah untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkannya umumnya dimulai dari hasil yang diinginkan terlebih dahulu lalu bekerja mundur untuk mengidentifikasi apa yang akan dapat menghasilkan hasil tersebut. Strategis merupakan metode dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perencanaan strategis memungkinkan suatu organisasi dalam membuat keputusan dasar yang dapat menuntun organisasi ke visi mengembangkan masa depan [1]. Dalam sebuah organisasi perencanaan strategi menjadi hal mendasar yang digunakan sebagai acuan untuk menjalankan langkah-langkah organisasi kedepannya. Hal ini juga berlaku pada lingkungan organisasi pemerintahan perencanaan strategis juga merupakan hal yang penting.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintahan Daerah Kabupten Bandung merupakan salah satu dari pemerintahan daerah yang memiliki otonomi daerah. Terdapat banyak dinas yang berada pada pemerintahan daerah Kabupaten Bandung, salah satunya adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar).

Dispopar merupakan salah satu dinas di Kabupaten Bandung yang memiliki kewajiban dalam menjalankan urusannya di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Bandung. Dalam rangka mewujudkan misi Dispopar Kabupaten Bandung maka perlu dijabarkan kembali melalui tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Dispopar Kabupaten Bandung yang akan dilaporkan kepada pihak Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten terdapat jenis dokumen perencanaan seperti pada tabel 1.[2]

Tabel 1 Jenis Dokumen Peencanaan

Dokumen Perencanaan	RPJPD	RPJMD	Renstra	RKPD	**Renja**
Jangka Waktu	25 tahun	5 tahun	5 tahun	1tahun	**1 tahun**
Pemilik Proses	Bappeda	Bappeda	Dinas	Bappeda	**Dinas**

Dari tabel 1 terlihat bahwa Bappeda menyusun RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) selama 25 tahun sekali. RPJPD tersebut terdiri dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang dibuat setiap lima tahun sekali. Sedangkan untuk setiap dinas wajib membuat dokumen perencanaan Renstra dan Renja. Setiap dinas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dituangkan pada Renstra yang dibuat setiap lima tahun sekali. Untuk menjalankan Renstra dinas diwajibkan membuat Renja setiap satu tahun sekali. Pesyaratan pembuatan Renja terdapat pada PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010. Untuk menghasilkan Renja yang sesuai dengan peraturan, maka setiap dinas perlu adanya penerapan peraturan PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010 dalam menyusun Renja.

Begitupun dengan Dispopar kabupaten Bandung yang harus membuat Renja setiap satu tahun sekali yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bappeda (Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda akibat yang ditimbulkan saat terjadinya keterlambatan penyusunan Renja di Dispopar Kabupaten Bandung berpengaruh terhadap penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Bandung. Keterlambatan penyusunan RKPD Bappeda memiliki dampak tidak turunnya anggaran, sehingga program dan kegiatan yang ada pada Renja tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepala Subbagian Bappeda Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Bapeda sebagai pihak yang menerima input berupa Renja SKPD mengalami kesulitan saat mengkoordinasikan Renja deengan pihak Dispopar. Kesulitan koordinasi tersebut disebabkan oleh adanya keterlambatan pengerjaan penyusunan Renja SKPD yang dilakukan oleh Dispopar Kabupaten Bandung. Penyusunan Renja seharusnya dilakukan selama 6 bulan, tetapi pada kenyataannya mengalami keterlambatan hingga 8 bulan lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Kepala Subbagian Program di Dispopar Kabupaten Bandung menyatakan terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan keterlambatan pada proses Penysunan Renja di Dispopar Kabupaten Bandung. Sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan penyusunan Renja KabupatenBandung dijelaskan pada diagram *fishbone* seperti pada gambar 1.

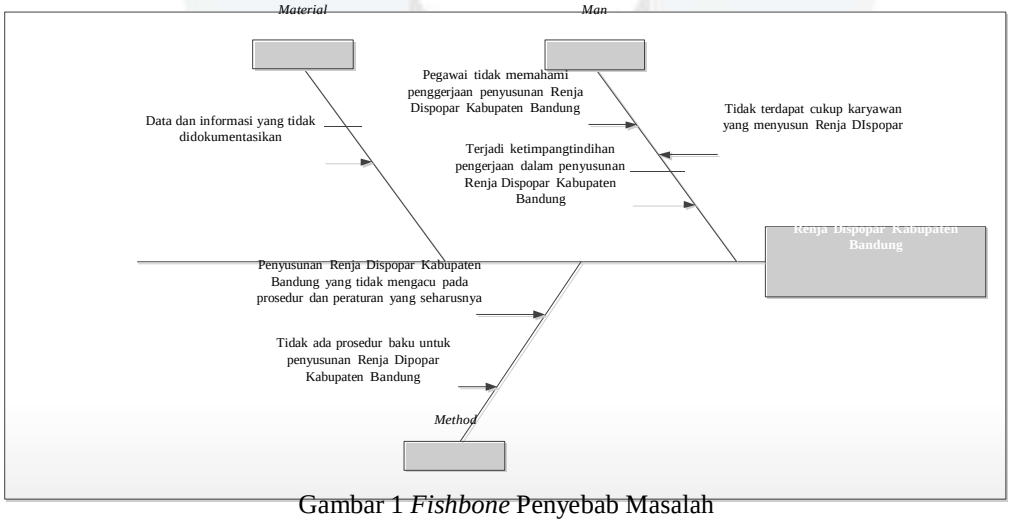

Gambar 1 *Fishbone* Penyebab Masalah

Penelitian ini berfokus pada perbaikan proses bisnis yang diterapkan pada penyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung. Perbaikan proses bisnis dituangkan dsalam bentuk SOP penyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana alur proses bisnis pada penyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung saat ini?
2. Bagaimana hasil analisa *gap* antara proses bisnis aktual penyusunan Renja Dispopar dengan proses bisnis *ideal* penyusunan Renja menurut PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010?
3. Bagaimana hasil analisis *gap* antara proses bisnis aktual dengan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3?
4. Bagaimana usulan perbaikan proses bisnis pemnyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung yang sesuai dengan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 dan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3 yang efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi alur proses bisnis pada penyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung saat ini.
2. Mengidentifikasi hasil analisa *gap* antara proses bisnis aktual penyusunan Renja Dispopar dengan proses bisnis *ideal* penyusunan Renja menurut PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010.
3. Mengidentifikasi hasil analisis *gap* antara proses bisnis aktual dengan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3.
4. Mengidentifikasi usulan perbaikan proses bisnis pemnyusunan Renja Dispopar Kabupaten Bandung yang sesuai dengan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 dan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3 yang efektif dan efisien.

2. Landasan Teori

2.1 ISO 9001:2008

ISO 9001 Berisi tentang persyaratan-persyaratan dalam sistem manajemen mutu, bila organisasi perlu menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan kepuasan pelanggan. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen mutu (*quality management system*). ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 hasil revisi 2008. Versi revisi 2008 ini merupakan revisi yang terbaru dan dikeluarkan pada Desember 2008. Pada penelitian ini, klausul yang digunakan adalah klausul 7.3 mengenai desai dan pengembangan. Adapun persyaratan yang adaa di dalam klausul 7.3 adaalh sebagai berikut.[3]

a. Klausul 7.3.1 Perencanaan Desain dan Pengembangan
b. Klausul 7.3.2 Masukan Desain dan Pengembangan
c. Klausul 7.3.3 Keluaran Desain dan Pengembangan
d. Klausul 7.3.4 Tinjauan Desain dan Pengembangan e.

Klausul 7.3.5 Verifikasi Desain dan Pengembangan

f. Klausul 7.3.6 Validasi Desain dan Pengembangan
g. Klausul 7.3.7 Pengendalian Perubahan Desain dan Pengembangan

2.2 *Business Process Improvement* (BPI)

Business process improvement merupakan salah satu cara yang dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan dalam membuat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan proses bisnisnya. BPI memberikan suatu sistem yang akan membantu dalam proses penyederhanaan (*sreamlining*) dari proses-proses bisnis, dengan memberi jaminan bahwa pelanggan internal dan eksternal dari organisasi akan mendapatkan *output* yang jauh lebih baik[4]. Karakteristik dari BPI antara lain sebagai berikut.

a. Tidak memerlukan waktu lama.
b. Biaya tidak terlalu besar.
c. Membuat proses efisien dengan melakukan penyederhanaan
d. Jika gagal, akibat yang ditimbulkan tidak terlalu besar.

Perbaikan suatu proses bisnis secara berkelanjutan memiliki sasaran sebagai berikut [4]:

a. Membuat proses efektif, mengeluarkan hasil yang diinginkan.
b. Membuat proses lebih efisien, dalam arti meminimasi sumber daya yang digunakan.
c. Membuat proses lebih adaptif, dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan bisnis.

Pada metode BPI dilakukan analisis aktivitas, yang terdapat dalam proses bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis (Harrington, 1991), yaitu :

a. *Real Value-Added* (RVA)
   Real Value-Added (RVA) merupakan aktivitas-aktivitas dari suatu proses bisnis yang secara langsung sangat dibutuhkan untuk menghasilkan *output* yang diharapkan oleh pelanggan.
b. *Business Value-Added* (BVA)
   Business Value-Added (BVA) merupakan aktivitas-aktivitas dari suatu proses bisnis yang tidak memberikan nilai tambah bagi *output* proses secara langsung, tetapi aktivitas ini diperlukan dalam proses bisnis sebagai pendukung.
c. *Non Value-Added* (NVA)
   Non Value-Added (NVA) merupakan aktivitas-aktivitas dari suatu proses bisnis yang tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan maupun dalam proses bisnis.

Setelah melakukan analisis aktivitas, dilakukan tahap analisis *streamlining* (penyederhanaan) dengan menggunakan 13 *tools streamling*diantaranya sebagai berikut.

a. *Bureaucracy elimination* (eliminasi birokrasi)
   Membuang kegiatan administratif yang tidak perlu, persetujuan – persetujuan dan pekerjaan yang membutuhkan banyak kertas.
b. *Duplication elimination* (eliminasi duplikasi)
   Menghilangkan aktivitas yang sama yang dilaksanakan pada bagian proses yang berbeda.
c. *Value-added assessment* (evaluasi nilai tambah)
   Mengevaluasi setiap proses apakah ada kontribusinya dalam memenuhi pelanggan.
d. *Simplification* (penyederhanaan)
   Mengurangi kompleksitas dari proses yang ada.
e. *Process cycle time reduction* (pengurangan waktu perputaran proses)
   Menentukan cara untuk menekan waktu perputaran agar dapat memenuhi harapan pelanggan dan meminimasi ongkos penyimpanan.
f. *Error proofing* (pencegahan kesalahan)
   Membuat kondisi sehingga sulit untuk melakukan kesalahan.
g. *Upgrading* (peningkatan performansi)
   Membuat penggunaan yang efektif dari model dan lingkungan pekerjaan untuk mengembangkan performansi pekerjaan.
h. *Simple language* (penyederhanaan bahasa)
   Mengurangi kompleksitas terhadap cara–cara penulisan dan berbicara, membuat dokumen lebih mudah dimengerti.
i. *Standardization* (standarisasi)
   Memilih salah satu cara melakukan kegiatan dan memerintahkan para pekerja untuk melakukan kegiatan dengan cara tersebut setiap waktu.
j. *Supplier partnership* (peningkatan kualitas *input*)
   Meningkatkan kualitas *input* karena *output–output* proses memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kualitas *input* proses yang diterima.
k. *Big picture improvement* (pengembangan secara global)
   Teknik yang digunakan ketika 10 penyederhanaan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Hal ini didesain untuk membantu organisasi atau manajemen mencari data yang kreatif untuk mengubah proses secara drastis.
l. Pengubahan urutan operasi
   Urutan operasi yang ada ditinjau lagi dan dilakukan perubahan urutannya untuk mengoptimalkan sumber daya, waktu dan biaya.
m. *Automation and/or mechanization* (otomatisasi dan/atau mekanisasi)
   Penerapan peralatan dan komputer–komputer pada pekerjaan–pekerjaan yang membosankan dan rutin sehingga kegiatan tersebut dikurangi untuk membebaskan pekerja dalam melakukan lebih banyak kegiatan kreatif.

3. Pembahasan

3.1 Proses Bisnis Aktual

Proses bisnis aktual penyusunan Renja di Dispopar Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Proses Bisnis Aktual Penyusunan Renja DISPOPAR Kabupaten Bandung

No	Proses Bisnis Aktual Pemnyusunan Renja DISPOPAR Kabupaten Bandung
1	Konsultasi publik ranwal RKPD Kabupaten Bandung
2	Acara konsolidasi Tim Musrenvang tingkat kecamatan
3	Mengikuti musrenbang Tingkat Kecamatan
4	Pelaksanaan forum SKPD
5	Musrenbang Kab Bandung
6	Perubahan Renja Pemda dan perubahan Renja SKPD
7	Penyampaian perubahan RKPD
8	Evaluasi hasil Renja SKPD
9	Rencana program kegiatan pada Renja SKPD

3.2 Proses Bisnis Menurut PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010

Proses bisnis penyusunan Renja berdasarkan PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Persyaratan Klausul 7.3 ISO 9001:2008

No	Proses Bisnis Pembuatan Renja	No	Proses Bisnis Pembuatan Renja
1	Pembentukan tim penyusun Renja	11	Merumuskan kegiatan prioritas
2	Orientasi mengenai Renja SKPD	12	Menyajikan dokumen awal rancangan Renja SKPD
3	Mengumpulkan data dan informasi	13	Mengamati kebijakan nasional
4	Mengolah data dan informasi	14	Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
5	Menganalisis gambaran pelayanan SKPD	15	Menyiapkan forum SKPD
6	Melakukan *review* hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD	16	Menyelenggarakan forum SKPD
7	Pengamatan Isu-isu penting pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	17	Membahas hasil forum SKPD
8	Mengamati rancangan awal RKPD	18	Menyesuaikan dokumen rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil forum SKPD
9	Merumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD	19	Verifikasi rancangan Renja SKPD dengan RKPD
10	Mengamati usulan program/ kegiatan dari masyarakat	20	Pengesahan Renja SKPD oleh kepala daerah

3.3 Identifikasi Gap Proses Bisnis Aktual dengan Proses Bisnis Menurut PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010

Identifikasi gap proses bisnis yang dilakukan antara proses bisnis aktual dan proses bisnis yang sesuai dengan PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010 dilakukan untuk memenuhi proses penyusunan Renja yang sesuai dengan peraturan. Hasil identifikasi gap dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Identifikasi Gap Proses Bisnis Aktual dengan Proses Bisnis Menurut PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010

Proses Bisnis Ideal berdasarkan PERMENDAGRI No 54 Tahun 2010	Proses Bisnis Aktual	Gap
Pembentukan Tim Penyusun Renja	-	Berdasarkan proses bisnis aktual di Dispopar Kabupaten Bandung belum terdapat prosedur mengenai pembentukan tim penyusun Renja.
Orientasi Mengenai Renja SKPD	-	Berdasarkan proses bisnis aktual di Dispopar Kabupaten Bandung belum terdapat prosedur mengenai orientasi mengenai Renja SKPD.
Pengumpulan Data dan Informasi	-	Berdasarkan proses bisnis aktual di Dispopar Kabupaten Bandung belum terdapat prosedur mengenai pengumpulan data dan informasi.
Pengolahan Data dan Informasi	-	Berdasarkan proses bisnis aktual di Dispopar Kabupaten Bandung belum terdapat prosedur mengenai pengumpulan data dan informasi.

3.4 Pemenuhan Persyaratan ISO 9001:2008 Klausul 7.3 dengan Proses Bisnis Penyusunan Renja yang sesuai dengan PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010

Pemenuhan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3 dilakukan untuk menjaga proses agar tetap konsisten. Pemenuhan persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Pemenuhan ISO 9001:2008 Klausul 7.3

Klausul	Persyaratan ISO 9001:2008 Klausul 7.3	Kondisi
7.3.1	Perencanaan Desain dan Pengembangan	Tidak Terpenuhi
7.3.2.	Masukan Desain dan Pengembangan	Terpenuhi
7.3.3.	Keluaran Desain dan Pengembangan	Terpenuhi
7.3.4	Tinjauan Desain dan Pengembangan	Terpenuhi
7.3.5	Verifikasi Desain dan Pengembangan	Tidak Terpenuhi
7.3.6.	Validasi desain dan pengembangan	Tidak Terpenuhi
7.3.7.	Pengendalian perubahan desain dan pengembangan	Tidak Terpenuhi

3.5 Penggabungan Proses Bisnis

Pengabungan proses bisnis antara proses bisnis aktual dan proses bisnis berdasarkan PEREMENDAGRI No 54 Tahun 2010 menghasilkan proses sebanyak 26 yang membentuk proses bisnis penyusunan Renja Dispopar di kabupaten Bandung. selanjutnya dilakukan proses analisis aktivitas seperti pada tabel 6.

Tabel 6 Penggabungan proses bisnis dan analisis Aktivitas

No	Aktivitas	Kategori aktivitas	Waktu Proses
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja	RVA	10
2	Orientasi Mengenai Renja SKPD	BVA	480
3	Pengumpulan Data dan Informasi	RVA	24
4	Pengolahan Data dan Informasi	BVA	480
5	Analisis Gambaran Pelayanan SKPD	BVA	480
6	Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu berdasarkan Renstra SKPD	BVA	16
7	Pengamatan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	BVA	160
8	Mengamati Rancangan Awal RKPD	BVA	27
9	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	RVA	16
10	Acara Konsolidasi Tim Musrenbang Tingkat Kecamatan	BVA	8
11	Musrenbang Tingkat Kecamatan	RVA	50
12	Musrenbang Kab Bandung	RVA	80
13	Pengamatan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	BVA	15
14	Perumusan Kegiatan Prioritas	RVA	13
15	Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja SKPD	BVA	56
16	Pengamatan Terhadap Kebijakan Nasional	BVA	3
17	Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD	BVA	16
18	Persiapan Forum SKPD	BVA	41
19	Penyelenggaraan Forum SKPD	RVA	5
20	Pembahasan Hasil Forum SKPD	RVA	80
21	Penyesuaian Rancangan Renja SKPD	RVA	132
22	Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD	RVA	17
23	Penyampaian perubahan RKPD	RVA	8
24	Evaluasi dan verifikasi hasil Renja SKPD	RVA	8
25	Rencana program kegiatan pada Renja SKPD	RVA	8
26	Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah	RVA	9

3.6 Proses Bisnis Usulan

Proses bisnis usulan penyusunan Renja Dispopar diperoleh berdasarkan proses bisnis yang telah sesuai dengan PERMENDAGRI No 4 Tahun 2010 dan hasil analisis aktivitas serta penyederhanaanya. Penyederhanaan dilakukan untuk menyederhanakan proses sehingga lebih efektif dan efisien. Hasil proses bisnis usulan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 Proses Bisnis Usulan Penyusunan Renja SKPD di Dispopar Kabupaten Bandung

No	Aktivitas	Pemilik Proses	Waktu Proses Usulan
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja	Sekretaris	10
2	Orientasi Mengenai Renja SKPD	Sekretaris	5
3	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi	Kepala Bidang	30
4	Analisis Gambaran Pelayanan SKPD	Kasubbag Program	22
5	Mereview Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu berdasarkan Renstra SKPD dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	Kasubbag Program	40
6	Mengamati Rancangan Awal RKPD	Kasubbag Program	27
7	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	Kepala Bidang	13
8	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Kepala Bidang	50
9	Musrenbang Kab Bandung	Kepala Bidang	80

Tabel 7 Proses Bisnis Usulan Penyusunan Renja SKPD di Dispopar Kabupaten Bandung (lanjutan)

No	Aktivitas	Pemilik Proses	Waktu Proses Usulan
10	Pengamatan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	Kepala Bidang	15
11	Pengamatan Terhadap Kebijakan Nasional	Kasubbag Program	3
12	Perumusan Kegiatan Prioritas	Kasubbag Program	13
13	Penyajian Awal Dokumen Rancangan Renja SKPD	Kasubbag Program	56
14	Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD	Kepala Bidang	16
15	Persiapan Forum SKPD	Kasubbag Program	41
16	Penyelenggaraan Forum SKPD	Kasubbag Program	5
17	Penyesuaian Rancangan Renja SKPD	Kasubbag Program	132
18	Verifikasi Rancangan Renja SKPD dengan RKPD	Kepala Dinas	17
19	Evaluasi dan Verivikasi hasil Renja	Kasubbag Program	8
20	Pengesahan Renja SKPD oleh Kepala Daerah	Kepala Dinas	9

Perbandingan waktu proses yang terjadi antara waktu proses dengan waktu proses usulan dilakukan untuk mengetahui perbedaan waktu yang dihasilkan. Dari hasil analisis diperoleh efisiensi waktu masing-masing kondisi.

$$\text{Efisiensi Waktu Proses} = \frac{\text{RVA}}{\text{Total Waktu Proses}} = \frac{460}{2242} = 0{,}205 = 20{,}5\%$$

$$\text{Efisiensi Waktu Proses Usulan} = \frac{\text{RVA}}{\text{Total Waktu Proses}} = \frac{357}{592} = 0{,}619 = 61{,}9\%$$

Hasil perhitungan efisiensi waktu proses dengan efieiensi waktu proses usulan menunjukkan bahwa efisiensi waktu proses usulan lebih besar dibandingkan efisiensi waktu proses efisiensi waktu proses sebesar 20,5%, sedangkan efisiensi waktu proses usulan sebesar 61,9%. Terdapat kenaikan efisiensi waktu proses sebesar 41,4%. Kenaikan tersebut mempengaruhi proses penyusunan Renja SKPD di Dispopar Kabupaten Bandung.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang didapat Dispopar Kabupaten Bandung dalam salah satu tugasnya mengenai pembuatatn Renja SKPD belum memenuhi PERMENDAGRI No 4 Tahun 2010. Sehingga, pada poses penmbuatan renja SKPD, Dispopar Kabupaten Bandung memiliki kendala yaitu keterlambatan pembuatan Renja SKPD. Pada kondisi aktual proses penyusuan Renja di Dispopar kabupaten Bandung terdapat 9 proses dan proses bisnis menurut PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010 terdapat 20 proses.

2. Pada analisi *gap* yang dilakukan antara proses bisnis aktual dan proses bisnis yang sesuai dengan PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010, terdapat 23 perbedaaan proses. Perbedaan tersebut menunjukan bahwa proses bisnis aktual yang tidak memenuhi standar penyusunan Renja SKPD.

3. Hasil dari proses bisnis aktual yang telah sesuai dengan PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010, dilakukan pemenuhan terhadap persyaratan ISO 9001:2008 klausul 7.3. Dari hasil analisis terdapat 4 dari 7 subklausul yang belum terpenuhi. Kalusul yang belum terpenuhi adalah klausul 7.3.1, klausul 7.3.5, klausul 7.3.6, dan klausul 7.3.7.

4. Perbaikan proses bisnis dengan metode BPI dilakukan melalui analisis aktivitas dan *streamling.* Analisis aktivitas menghasilkan 14 aktivitas yang termasuk kategori RVA dan 12 aktivitas yang termasuk kategori BVA. Sedangkan untuk analisis *streamlining* dengan menggunakan 13 *tools streamlining* menghasilkan 4 aktivitas dilakukan *streamlining process cycle time reduction,* 4 aktivitas dilakukan *steamlining simplification,* 1 aktivitas dilakukan *steamlining* pengubahan urutan proses dan 3 aktivitas dilakukan *steamlining duplicate elimination.* Sehingga proses bisnis usulan penyusun Renja SKPD di Dispopar Kabupeten Bandung menjadi berjumlah 20 aktivitas dari 26 aktivitas.

Daftar Pustaka:

[1] Green, Anson.2007. *LEP Guide for Workforce Professionals.*Texas Workfoce Commision:Austin.
[2] BAPPEDA.(2010). *Rencana Strategis BAPPEDA 2014-2015*. Kabupaten Bandung: BAPPEDA.
[3] ISO. (2008). ISO 9001:2008 Quality Management Systems - Persyaratans. Jenewa, Swiss: ISO.
[4] Harrington, H. James., *Business Process Improvement*, McGraw-Hill, New York, 1991.